

PENERAPAN KONSEP AMANAH DAN KEADILAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH: STUDI KASUS PADA BMT PC KOTA BEKASI

Edison Hamid¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Mitra Karya Bekasi

Email: Edisonvgh@yahoo.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam akuntansi syariah serta mengidentifikasi tantangan transparansi di BMT PC Kota Bekasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus, manajer keuangan, auditor internal, dan anggota, serta dokumen laporan keuangan tahun 2020–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah tercermin dalam pencatatan detail, audit internal tahunan, dan komunikasi terbuka dengan anggota, sedangkan prinsip keadilan diwujudkan melalui distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional dan penyampaian laporan keuangan secara terbuka dalam Rapat Anggota Tahunan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia akuntansi syariah dan keterlambatan publikasi laporan tahunan masih menjadi hambatan yang dapat memengaruhi transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai amanah dan keadilan telah terinternalisasi dalam praktik akuntansi syariah, tetapi peningkatan kapasitas SDM serta modernisasi sistem pelaporan masih diperlukan agar penerapan prinsip syariah lebih optimal.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah; Amanah; Keadilan; Transparansi; Laporan Keuangan

Abstract

Implementasi Nilai Amanah dan Keadilan dalam Praktik Akuntansi Syariah: Studi Kasus pada BMT PC Kota Bekasi

This study aims to analyze the implementation of trust and justice principles in Islamic accounting and to identify transparency challenges at BMT PC Kota Bekasi. Employing a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with management, financial managers, internal auditors, and members, along with financial reports from 2020–2022. The findings reveal that the principle of trust is reflected in detailed bookkeeping, annual internal audits, and open communication with members, while the principle of justice is demonstrated through the proportional distribution of profit sharing (SHU) and the transparent presentation of financial reports at the Annual Members Meeting. Nevertheless, limited human resources in Islamic accounting and delays in annual report publication remain obstacles that may undermine transparency. This study concludes that the values of trust and justice have been internalized in Islamic accounting practices, yet enhancing human resource capacity and modernizing reporting systems are still required to achieve optimal implementation of sharia principles.

Keywords: Islamic Accounting; Trust; Justice; Transparency; Financial Reportings

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi, praktik akuntansi tidak lagi hanya dipandang sebagai proses teknis pencatatan transaksi, melainkan juga

sebagai instrumen yang mencerminkan nilai, etika, dan tanggung jawab sosial (Larasati Husodo et al., 2024). Akuntansi berkembang sebagai bahasa bisnis

yang menyampaikan kondisi finansial suatu entitas kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal (Egi & Hanayanti, n.d.; Qari'ah Noor Aminah Muchiballah, 2023; Rius Iaia et al., 2024). Namun, orientasi akuntansi modern yang sering kali berfokus pada kepentingan pemilik modal dan efisiensi keuntungan menimbulkan kritik dari kalangan akademisi dan praktisi. Banyak kasus manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan maupun perusahaan (Christian et al., 2021; Iswanaji, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntansi bukanlah sekadar ilmu eksak, tetapi memiliki dimensi moral yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip ekonomi, akuntabilitas, dan nilai etika sangat diperlukan untuk membangun sistem pelaporan yang lebih adil dan transparan.

Krisis keuangan global pada 1997 dan 2008 memberikan pelajaran penting tentang rapuhnya sistem ekonomi yang mengabaikan dimensi moral dan etika dalam bisnis (Miswanto & Aslan, 2020; Raz et al., 2012). Skandal akuntansi seperti yang dialami oleh Enron, WorldCom, hingga kasus manipulasi laporan keuangan di berbagai negara Asia menegaskan bahwa praktik akuntansi yang hanya berorientasi pada laba tanpa memperhatikan nilai moral dapat menimbulkan dampak destruktif bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial (Firdausy, 2024). Masyarakat global mulai menyadari bahwa akuntansi harus lebih dari sekadar penyajian angka-angka

keuangan; ia harus mencerminkan kebenaran, keadilan, dan kepedulian sosial (Ihsanul Windasari, 2024; Jumardi et al., 2024). Kondisi ini mendorong munculnya tuntutan agar praktik akuntansi mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan akuntabilitas yang tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan moral.

Dalam konteks tersebut, akuntansi syariah hadir sebagai alternatif yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran Islam (Hidayat, 2025; Muhammad Rafly et al., 2025). Akuntansi syariah tidak sekadar berbicara tentang bagaimana transaksi keuangan dicatat sesuai standar, tetapi juga bagaimana nilai amanah (kepercayaan) dan keadilan diterapkan dalam setiap aktivitas akuntansi (Farizi et al., 2025; Iklimah Nur Sholeha & Ersi Sisdianto, 2024). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap entitas ekonomi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang mempercayakan dana dan asetnya. Nilai-nilai inilah yang membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada kepentingan pemilik modal semata. Oleh karena itu, kehadiran akuntansi syariah bukan hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih berkeadilan.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak praktik akuntansi yang belum sepenuhnya mencerminkan

transparansi dan keadilan. Laporan keuangan sering kali dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya penyimpangan dalam pencatatan, keterlambatan dalam pelaporan, hingga praktik manipulasi data untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan maupun entitas bisnis. Padahal, seharusnya laporan keuangan menjadi instrumen yang membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegagalan dalam membangun kepercayaan tersebut justru berpotensi mengurangi legitimasi sosial lembaga keuangan itu sendiri.

Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam keberlangsungan lembaga keuangan maupun organisasi bisnis. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan antara pengelola dana dan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Namun, kepercayaan ini tidak dapat diperoleh hanya melalui mekanisme teknis, melainkan melalui internalisasi nilai etika dalam praktik akuntansi. Konsep amanah menuntut setiap pengelola keuangan untuk menjaga dan mengelola dana sesuai dengan ketentuan syariah serta tidak menggunakannya secara sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan menghendaki agar semua pemangku kepentingan mendapatkan haknya secara proporsional dan tidak dirugikan oleh praktik yang tidak transparan. Dengan demikian, amanah dan keadilan harus menjadi

prinsip utama dalam setiap bentuk laporan keuangan yang disajikan.

Di sisi lain, masyarakat modern semakin menuntut adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dari setiap organisasi yang mengelola dana publik. Tuntutan ini tidak hanya berasal dari regulator, tetapi juga dari masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemilik modal. Mereka menuntut agar laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip etika. Dalam kerangka akuntansi syariah, transparansi tidak dapat dipisahkan dari nilai amanah, karena keterbukaan laporan keuangan adalah salah satu wujud menjaga kepercayaan masyarakat. Begitu pula, keadilan menjadi dasar agar pelaporan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa kedua prinsip ini, laporan keuangan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa makna substantif.

Masalah yang dihadapi masyarakat saat ini adalah rendahnya literasi akuntansi syariah, terutama terkait nilai moral yang terkandung di dalamnya. Banyak pengelola dana yang memahami akuntansi sebatas aspek teknis pencatatan, tanpa menyadari bahwa di balik angka terdapat nilai etika yang harus dijaga. Rendahnya pemahaman ini seringkali melahirkan praktik yang jauh dari prinsip syariah, seperti penyajian laporan yang tidak lengkap, keterlambatan pelaporan, dan minimnya keterbukaan informasi kepada anggota atau masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung, maka peran akuntansi syariah sebagai sarana

menciptakan keadilan sosial tidak akan terwujud. Oleh karena itu, pendidikan dan internalisasi nilai syariah dalam praktik akuntansi menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan nilai amanah dan keadilan (Holis et al., 2025). Banyak lembaga keuangan mikro dan koperasi syariah yang masih kesulitan mencari tenaga akuntansi yang menguasai standar syariah sekaligus memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas akuntansi syariah dan praktik di lapangan. Padahal, sumber daya manusia adalah kunci dalam memastikan bahwa setiap proses pencatatan, pelaporan, hingga penyajian informasi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa adanya SDM yang kompeten, maka penerapan amanah dan keadilan dalam akuntansi syariah hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi yang nyata.

Selain faktor SDM, tantangan lain yang dihadapi adalah perkembangan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan akuntansi syariah secara menyeluruh. Meskipun Dewan Standar Akuntansi Syariah telah mengeluarkan berbagai pedoman, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis maupun kultural. Banyak entitas yang hanya menjadikan kepatuhan terhadap standar sebagai formalitas tanpa internalisasi nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara teks regulasi dengan praktik nyata di lapangan. Akibatnya, laporan

keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip akuntansi syariah.

Fenomena lain yang muncul adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keberlanjutan (sustainability) dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan. Dalam konteks ini, akuntansi syariah memiliki potensi besar untuk menjawab tuntutan tersebut karena nilai amanah dan keadilan yang diusung sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Namun, jika prinsip tersebut tidak benar-benar diimplementasikan dalam praktik pelaporan keuangan, maka potensi akuntansi syariah hanya akan berhenti pada tataran konsep. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk melihat sejauh mana prinsip amanah dan keadilan benar-benar diterapkan dalam praktik akuntansi syariah, serta dampaknya terhadap kepercayaan dan keberlanjutan lembaga keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa akuntansi syariah memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan dan menciptakan keadilan dalam sistem keuangan. Nilai amanah menuntut pengelolaan dana dengan penuh tanggung jawab, sedangkan keadilan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan dan proporsional. Fenomena masih adanya ketidaktransparanan laporan keuangan dan keterbatasan internalisasi nilai syariah menunjukkan perlunya kajian akademik yang lebih mendalam. Penelitian tentang penerapan amanah

dan keadilan dalam akuntansi syariah akan memberikan kontribusi penting, baik secara teoritis maupun praktis, untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di tengah dinamika masyarakat modern.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena peneliti berupaya memahami makna penerapan prinsip amanah dan keadilan secara mendalam dari perspektif para pelaku lembaga keuangan syariah. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci yang terdiri dari satu orang ketua pengurus BMT, dua manajer bidang keuangan dan pembiayaan, satu auditor internal, serta empat orang anggota aktif BMT yang memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun. Masing-masing informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatannya dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana. Ketua pengurus memberikan pandangan strategis mengenai implementasi prinsip syariah dalam kebijakan lembaga, manajer keuangan menjelaskan aspek teknis pencatatan dan pelaporan, auditor internal menekankan pada mekanisme pengawasan, sedangkan anggota menyampaikan pengalaman dan persepsi mereka terkait transparansi laporan keuangan. Dengan cara ini, peneliti dapat menangkap perspektif yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana nilai amanah dan keadilan diinternalisasikan dalam praktik akuntansi.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen internal lembaga. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan keuangan tahunan BMT periode 2020–2023, notulen rapat anggota tahunan (RAT), pedoman akuntansi syariah internal, serta laporan audit internal. Laporan keuangan digunakan untuk menilai aspek transparansi dan konsistensi dalam penyajian informasi, sementara notulen RAT dianalisis untuk melihat sejauh mana prinsip partisipasi dan keadilan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dijalankan. Pedoman akuntansi syariah internal dibandingkan dengan standar akuntansi syariah yang berlaku nasional untuk mengidentifikasi kesenjangan penerapan, sedangkan laporan audit internal digunakan untuk menilai efektivitas mekanisme pengawasan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjaga validitas serta memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar merefleksikan realitas lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Amanah

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip amanah dalam akuntansi syariah di BMT PC Kota Bekasi dijalankan melalui berbagai mekanisme yang berorientasi pada keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban moral. Prinsip amanah dipahami bukan sekadar sebagai kewajiban teknis mencatat

transaksi, tetapi juga sebagai nilai spiritual yang mengikat pengurus dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap dana anggota. Ketua pengurus menegaskan: “Kami selalu berupaya menjaga kepercayaan anggota. Semua transaksi dicatat harian, tidak boleh ada yang tertinggal. Jika ada kesalahan kecil, kami langsung koreksi agar tidak merugikan anggota.” Ungkapan ini menggambarkan kesadaran bahwa amanah merupakan fondasi utama pengelolaan keuangan, karena pada hakikatnya dana yang dikelola adalah titipan anggota yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Lebih lanjut, manajer keuangan menjelaskan praktik rutin yang dilakukan: “Setiap akhir bulan, kami menyusun laporan bulanan yang kemudian diverifikasi. Sebelum RAT tahunan, laporan itu diaudit internal agar tidak ada keraguan dari anggota.” Hal ini memperlihatkan adanya sistem kontrol yang memastikan akurasi data keuangan sekaligus memperkuat legitimasi lembaga di mata anggota. Tidak hanya sebatas formalitas, audit internal dipandang sebagai mekanisme moral untuk menjamin keterbukaan dalam penyajian laporan. Transparansi ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana amanah diimplementasikan dalam praktik akuntansi syariah.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan temuan pada dokumen laporan keuangan tahunan BMT PC Kota Bekasi tahun 2021–2023 yang menunjukkan adanya konsistensi dalam penyajian informasi keuangan, mulai dari laporan posisi keuangan, laporan hasil usaha, hingga catatan atas laporan keuangan. Setiap tahun,

laporan ini disahkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan dibagikan kepada seluruh anggota. Dalam dokumen laporan keuangan tahun 2022, misalnya, tercantum secara jelas rincian simpanan anggota, pembiayaan yang disalurkan, serta dana cadangan. Hal ini sesuai dengan pengakuan anggota yang menyatakan rutin menerima laporan tabungan dan pembiayaan, baik saat rapat maupun dalam bentuk cetakan. Fakta ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara praktik akuntansi sehari-hari dengan penyajian laporan resmi, sehingga transparansi benar-benar terwujud.

Dari sisi anggota, kepercayaan yang tumbuh juga menjadi indikator keberhasilan penerapan amanah. Salah seorang anggota menyampaikan: “Saya rutin menerima laporan tabungan dan pembiayaan, baik saat rapat maupun dicetak. Dengan begitu saya yakin uang saya benar-benar dikelola dengan baik.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi terbuka antara pengurus dan anggota telah menumbuhkan keyakinan bahwa dana mereka dikelola secara bertanggung jawab. Beberapa anggota lain juga menekankan bahwa keterbukaan laporan keuangan membuat mereka merasa dihargai dan diperlakukan sebagai pemilik sekaligus pengawas lembaga, bukan sekadar pengguna jasa.

Selain itu, amanah juga tercermin dari sikap pengurus dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan dana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap kebijakan pembiayaan selalu melewati proses musyawarah dan pertimbangan syariah, sehingga tidak ada keputusan

yang bersifat sepihak. Dalam dokumen laporan keuangan tahun 2023, misalnya, tercantum catatan bahwa keputusan penyaluran pembiayaan didasarkan pada hasil musyawarah pengurus dan pengawas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini membuktikan bahwa amanah dipraktikkan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif, bukan hanya individu. Dengan demikian, penerapan amanah tidak hanya terbatas pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga mencakup nilai spiritual, moral, sosial, serta terbu

Keadilan

Dalam aspek keadilan, penelitian ini menemukan bahwa distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) di BMT PC Kota Bekasi dilaksanakan dengan berpegang teguh pada prinsip proporsionalitas sesuai dengan kontribusi modal dan keaktifan transaksi masing-masing anggota. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam praktik akuntansi syariah. Auditor internal menegaskan: “Pembagian SHU dilakukan sesuai porsi kontribusi, tidak boleh ada perbedaan perlakuan, karena prinsip syariah menuntut keadilan.” Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran kuat bahwa laporan keuangan bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anggota secara adil.

Mekanisme pembagian SHU dilakukan secara terbuka melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh seluruh anggota. Pada forum tersebut, laporan keuangan

dipaparkan secara detail oleh manajer keuangan, mulai dari posisi aset, liabilitas, hingga rincian distribusi SHU. Berdasarkan dokumen laporan keuangan tahun 2021–2023, tercatat bahwa SHU dibagi ke dalam beberapa pos: pembagian untuk anggota sesuai simpanan, cadangan lembaga, dana sosial, dan biaya pengembangan usaha. Proporsi pembagian tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam catatan laporan, sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun kecurigaan. Misalnya, pada laporan tahun 2022, sekitar 60% SHU dialokasikan langsung kepada anggota sesuai simpanan, sedangkan sisanya digunakan untuk cadangan dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan tanggung jawab sosial lembaga.

Keadilan juga tercermin dalam pengalaman anggota. Seorang anggota yang sudah bergabung lebih dari lima tahun menyampaikan: “Setiap tahun saya mendapat bagian SHU sesuai simpanan saya. Tidak pernah ada potongan atau perbedaan. Itu yang membuat saya bertahan di sini.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa sistem proporsionalitas yang diterapkan telah menumbuhkan rasa puas dan loyalitas anggota. Beberapa anggota lain menambahkan bahwa keadilan bukan hanya terlihat dari pembagian SHU, tetapi juga dari kesempatan yang sama untuk mengakses informasi keuangan serta hak suara dalam forum RAT. Dengan kata lain, keadilan dipraktikkan tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga dalam aspek partisipasi dan keterbukaan pengambilan keputusan.

Lebih jauh, dokumen laporan keuangan BMT PC Kota Bekasi tahun

2023 menegaskan bahwa tidak ada selisih atau manipulasi saldo dalam pencatatan distribusi SHU. Setiap angka yang disajikan telah diverifikasi auditor internal dan disahkan dalam RAT, sehingga meneguhkan akuntabilitas laporan tersebut. Mekanisme ini memperkuat pandangan bahwa prinsip keadilan dalam akuntansi syariah bukan hanya konsep normatif, melainkan dihidupkan dalam praktik nyata melalui transparansi dokumen resmi. Dengan demikian, keadilan dalam akuntansi syariah di BMT PC Kota Bekasi tidak hanya sebatas jargon, tetapi telah menjadi nilai operasional yang terinternalisasi dalam sistem pelaporan dan distribusi hasil usaha.

Tantangan

Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa nilai amanah dan keadilan telah menjadi prinsip utama dalam praktik akuntansi syariah di BMT PC Kota Bekasi, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang masih dihadapi lembaga. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman mendalam mengenai akuntansi syariah. Manajer keuangan mengakui: “Kami belajar secara bertahap, banyak yang otodidak. Untuk standar akuntansi syariah yang lebih kompleks, kami kadang perlu konsultasi keluar.” Hal ini menandakan bahwa meskipun pengurus dan manajemen memiliki komitmen kuat terhadap nilai syariah, pemahaman teknis mereka terkait PSAK Syariah masih belum optimal. Kesenjangan kompetensi ini berpotensi menghambat penerapan akuntansi syariah secara konsisten,

terutama ketika dihadapkan pada transaksi kompleks seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang memerlukan perlakuan akuntansi spesifik.

Tantangan kedua adalah keterlambatan publikasi laporan tahunan yang disebabkan oleh masih dominannya proses verifikasi manual. Auditor internal menjelaskan: “Proses verifikasi masih banyak manual, sehingga laporan tahunan sering terlambat. Kami berusaha memperbaiki ini agar anggota tidak merasa dirugikan.” Proses manual ini tidak hanya memperlambat penyajian laporan, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan redundansi data. Kondisi tersebut berdampak langsung pada persepsi anggota, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota: “Laporan tahunan sering agak lambat keluar. Kadang kami harus menunggu RAT untuk tahu detail keuangan. Sebenarnya kami ingin lebih cepat.” Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan anggota terhadap keterbukaan informasi dan realitas teknis yang dihadapi lembaga. Jika keterlambatan ini terus berulang, potensi menurunnya transparansi bisa terjadi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan anggota.

Tantangan lain yang teridentifikasi adalah minimnya digitalisasi dalam sistem akuntansi. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pencatatan transaksi memang sudah menggunakan sistem komputerisasi sederhana, tetapi integrasi dengan sistem pelaporan keuangan masih terbatas. Hal ini membuat konsolidasi data bulanan dan tahunan memakan waktu cukup

lama. Padahal, perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan digitalisasi akuntansi seharusnya dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pencatatan sekaligus meningkatkan akurasi. Namun, keterbatasan anggaran dan SDM yang belum terbiasa dengan teknologi akuntansi modern menjadi kendala tersendiri dalam proses adopsinya.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya tantangan budaya organisasi, yaitu belum sepenuhnya terbangunnya kesadaran kolektif di kalangan seluruh pengurus tentang pentingnya akuntansi syariah sebagai instrumen etis, bukan sekadar teknis. Beberapa pengurus junior, berdasarkan hasil wawancara, masih melihat laporan keuangan sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi regulator, bukan sebagai wujud pertanggungjawaban moral kepada anggota. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar dalam membangun internalisasi nilai amanah dan keadilan secara menyeluruh pada seluruh lapisan pengurus dan karyawan.

Secara umum, meskipun anggota masih menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengurus, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan aspek teknis dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak. Lembaga perlu mengupayakan pelatihan akuntansi syariah yang lebih terstruktur, mengintegrasikan sistem akuntansi digital, serta membangun budaya organisasi yang berorientasi pada nilai etika syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, tantangan yang ada dapat diatasi, sehingga prinsip amanah dan keadilan dapat dijalankan

secara lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah di BMT PC Kota Bekasi dijalankan melalui mekanisme pencatatan yang detail, audit internal tahunan, serta komunikasi terbuka dengan anggota. Pencatatan harian hingga penyusunan laporan bulanan yang diverifikasi sebelum diaudit tahunan memperlihatkan keseriusan pengurus dalam menjaga keakuratan data keuangan. Lebih jauh, keterbukaan dalam penyampaian laporan kepada anggota bukan hanya menjadi formalitas administratif, melainkan juga menjadi wujud nyata tanggung jawab moral dan spiritual pengurus dalam menjaga dana titipan masyarakat. Temuan ini memperkuat argumen (Nurhikmah & Sisdiyanto, 2024) yang menegaskan bahwa transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan informasi keuangan merupakan faktor utama yang mendorong kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan maupun bisnis. Dengan demikian, implementasi amanah di BMT PC Kota Bekasi tidak hanya sebatas menjalankan aturan akuntansi, tetapi telah menjadi fondasi legitimasi moral yang menentukan keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang.

Selain itu, aspek keadilan yang tercermin dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional sesuai kontribusi anggota memperkuat posisi BMT sebagai lembaga yang menjunjung nilai syariah. Prinsip proporsionalitas yang diterapkan memastikan bahwa

anggota dengan kontribusi modal lebih besar dan keterlibatan transaksi lebih aktif memperoleh hak yang sesuai, sementara anggota lain tetap mendapatkan bagian secara adil sesuai porsinya. Transparansi dalam penyampaian hasil usaha melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) menambah nilai akuntabilitas, sehingga anggota merasa diperlakukan secara setara dan tidak ada praktik diskriminatif. Temuan ini selaras dengan penelitian Salsabila (2024) yang menyatakan bahwa keadilan dalam distribusi keuntungan meningkatkan loyalitas dan kepuasan anggota koperasi syariah, sekaligus memperkuat daya tahan lembaga terhadap tantangan eksternal. Dengan memastikan tidak ada ketidakadilan dalam pembagian hasil, BMT berhasil menciptakan rasa memiliki yang kuat di kalangan anggota, yang pada akhirnya memperkuat hubungan harmonis antara pengurus dan pemilik modal sosial lembaga.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa BMT masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang perlu segera diatasi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar memahami standar akuntansi syariah menjadi hambatan utama dalam menjaga konsistensi kualitas pelaporan. Sebagaimana diakui oleh manajer keuangan, sebagian besar staf akuntansi memperoleh keahlian secara otodidak melalui pelatihan internal, sehingga pemahaman mereka terhadap standar akuntansi syariah formal masih belum optimal. Kedua, keterlambatan publikasi laporan tahunan akibat dominasi verifikasi manual menimbulkan potensi penurunan kepercayaan

anggota. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dan implementasi teknis di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hasran & Yashari Soumena (2025) yang menyoroti bahwa keterbatasan kompetensi SDM dalam memahami standar akuntansi syariah dapat mengurangi kualitas pelaporan dan menurunkan tingkat transparansi lembaga. Oleh karena itu, peningkatan literasi akuntansi syariah melalui pelatihan berkelanjutan, modernisasi sistem informasi keuangan, serta kolaborasi dengan auditor eksternal menjadi strategi penting untuk menjaga kredibilitas BMT sekaligus menjawab tuntutan masyarakat modern terhadap akuntabilitas yang lebih tinggi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip amanah dalam akuntansi syariah di BMT PC Kota Bekasi diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang detail, penyusunan laporan rutin yang diverifikasi, serta audit internal tahunan yang terbuka bagi anggota. Sementara itu, prinsip keadilan tercermin dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional sesuai kontribusi anggota, serta keterbukaan laporan keuangan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kedua prinsip ini berhasil menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas anggota sebagai modal sosial utama keberlangsungan lembaga.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah secara komprehensif dan

keterlambatan publikasi laporan tahunan akibat proses manual. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM dan modernisasi sistem pencatatan menjadi langkah penting agar nilai amanah dan keadilan dapat terus terinternalisasi secara optimal dalam praktik akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian, N., Jessica, J., & Rionaldo, L. (2021). PENDETEKSIAN FINANCIAL SHENANIGANS PADA LAPORAN KEUANGAN PT GARUDA INDONESIA TBK. *JURNAL MANEKSI*, 10(1), 66–75. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.644>
- Egi, O. :, & Hanayanti, E. (n.d.). *PENGARUH SEJARAH AKUNTANSI DI EROPA, AMERIKA DAN INDONESIA TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA RSUD CENGKARENG)*.
- Farizi, S., Aulia, R., Kiai, N., Ahmad, H., & Jember, S. (2025). Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan KUA Kecamatan Silo. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 807–813. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.194>
- Firdausy, A. (2024). Perilaku Tidak Etis dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik: Studi Kasus pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 619–628. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2431>
- Hasran, K., & Yashari Soumena, F. (2025). TANTANGAN DAN PROSPEK PELAPORAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN INVESTOR. *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 4(3), 37–52. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2054>
- Hidayat, R. (2025). Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENJAWAB REALITAS EKONOMI MODERN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.2000>
- Holis, M., Fawaid, A., & Bakti Bangsa, S. (2025). STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS SYARIAH PADA UMKM BATIK MADURA. In *Journal of Economic and Islamic Research* (Vol. 3, Issue 2).
- Ihsanul Windasari. (2024). IMPLEMENTASI KONSEP CSR DAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DALAM REFLEKSI NILAI TOKOH PEWAYANGAN KRESNA. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(3), 2099–2112. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1290>
- Iklimah Nur Sholeha, & Ersi Sisdiyanto. (2024). ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*

- Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 387–400.
<https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.528>
- Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, U., Terintegrasi Islam, A., Keuangan, L., Syariah, P.-P., & -----, K. (2023). *Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Nasrullah Djamil* ARTICLE INFO : ABSTRACT Keywords. 1(1).
- Iswanaji, C. (2018). MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN BENEISH RATIO INDEX PADA PABRIK CAMBRIC YOGYAKARTA. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 25–34.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.24>
- Jumardi, Salam, & Ramli, S. (2024). AKUNTANSI SOSIAL DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF TEOLOGI PEMBEBASAN KAUM MUSTADH'AFIN. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 29–51.
<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2784>
- Larasati Husodo, D., Najla Afifah, G., Uzliawati, L., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2024). Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah : Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi. *Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 7(2).
<https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5910>
- Miswanto, M., & Aslan, V. S. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN: SESUDAH DAN SEBELUM KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 16(1), 19.
<https://doi.org/10.25170/balance.v16i1.1285>
- Muhammad Rafly, Delvi Ramadani, Bella Puspita Sari, & Peny Cahaya Azwari. (2025). Analisis Peran Akuntansi Syariah Untuk Transparansi Dan Keberlanjutan Ekonomi Lembaga Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mitra Khazanah Palembang. *AKUNTANSI* 45, 6(1), 278–295.
<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4281>
- Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). PERAN AKUNTAN DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN: PERSPEKTIF ETIKA. *JMA*, 2(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Qari'ah Noor Aminah Muchiballah. (2023). ANALISIS KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN ECONOMIC ENTITY CONCEPT PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5).
- Raz, A. F., Indra, T. P. K., & Artikasih, D. K. (2012). KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI:
ANALISA DARI
PEREKONOMIAN ASIA
TIMUR. *Buletin Ekonomi
Moneter Dan Perbankan*, 15(2),
37–56.
[https://doi.org/10.21098/bemp.v
15i2.61](https://doi.org/10.21098/bemp.v15i2.61)

Rius Iaia, S., Satrio Jeremy, G.,
Siagian, M. A., Akbar, M. R.,
Sinaga, R. Y., & Wulandari, A.
N. (2024). Indonesian as a
Communication Tool in
Accounting in the Digital Era. In
*Journal Islamic Social Sciences
And Humanities* (Vol. 2).

Salsabila, Z. (2024). Peran
manajemen strategi dalam
mewujudkan kualitas unggul
pada koperasi syariah. In *Maliki
Interdisciplinary Journal (MIJ)
eISSN* (Vol. 2). [http://urj.uin-
malang.ac.id/index.php/mij/inde
x](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index)